



RENCANA KERJA

2025

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya sehingga Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat tersusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, maka diharapkan dapat dijadikan dasar penyusunan anggaran oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna untuk Tahun 2025 dan melalui dokumen ini pula, pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam adanya perencanaan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.

Ranai, 5 Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Hasil Evaluasi Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Lalu.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	22
3.3. Program dan Kegiatan.....	24
3.4. Cascading dan Crosscutting.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	46
4.2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.....	48
4.3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.....	49
4.4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	50
BAB V PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Hasil Evaluasi Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2023.....	10
Tabel 2.2	: Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023.....	16
Tabel 2.3	: Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 dari Pemangku Kepentingan.....	19
Tabel 3.1	: Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.....	23
Tabel 3.2	: Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.....	24
Tabel 3.3	: Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.....	26
Tabel 4.1	: Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Natuna Tahun 2025.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Cascading Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.....	44
Gambar 3.2	: Crosscutting Kinerja Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.....	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16). Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Daerah.

b. Fungsi dan kewenangan

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan pegkajian kebijakan daerah dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
- g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan penjabaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan gambaran tentang program, kegiatan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2019 - 2024. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 361);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2025
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Lalu

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 11,770,470,469 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10,245,280,127 atau sebesar 87,04% dan realisasi fisik sebesar 98,8%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 dan capaian Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
- 2. Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja atau capaian kinerja kurang dari 75% adalah sebagai berikut:
 - a. **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 37,10 dari target kinerja 55.
 - b. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**, Indikator kinerja Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan dengan realisasi kinerja 0 dari target kinerja 1 Paket.
 - c. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**, indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi kinerja 60 laporan dari target kinerja 93 laporan.
 - d. **Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**, indikator kinerja Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan realisasi kinerja 0 dari target kinerja 3 masukan.

3. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan atau capaian kinerja kurang dari 75%:
 - a. Masih kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi menyebabkan rendahnya nilai Indeks Inovasi Daerah.
 - b. Terdapat sub kegiatan tidak dilaksanakan karena penganggaran tidak berdasarkan kebutuhan.
 - c. Tingginya target kinerja pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - d. Analisis data perencanaan dan evaluasi berdasarkan dari prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang tertuang dalam portal SDI, namun dalam proses analisis data, data tersebut belum memenuhi prinsip SDI dan belum terintegrasi ke dalam portal SDI, Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor Penyebab.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Lebih optimal dalam memberi sosialisasi dan desiminasi tentang pentingnya peran Perangkat Daerah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
- b. Melakukan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- c. Melakukan penyesuaian target kinerja pada perubahan renstra tahun 2021-2026 dan penyesuaian target capaian pada tahun anggaran 2025.
- d. Memastikan data yang diproduksi oleh Produsen Data berkualitas (sesuai Standar, Metadata Baku dari Pembina Data serta dihasilkan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk dan dapat dimanfaatkan bersama (interoperabilitas).
- e. Sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2023

PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																													
Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)				Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022				Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16		
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																											
5.01.		PERENCANAAN																											
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan UKJP	Nilai	88.35	178.132.000	82.82	892.936	88.35	180.000.000	88.35	14.738.620	82.82	0	82.82	0	73.45	0	73.45	0	73	0	83.14	0.00	196.27	892.936	176.88	0.50	
5.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	178.132.000	89	892.936	70	180.000.000	70	14.738.620	65.51	0	68.96	0	82.76	0	100	0	100	0	142.86	0.00	189	892.936	270.00	0.50	
5.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	104.066.000	2	892.936	2	120.000.000	2	750.000	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100.00	0.00	4	892.936	200.00	0.86	target kinerja dilaksanakan pada TW IV
5.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Akhlar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Akhlar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Akhlar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	74.066.000	3	0	3	60.000.000	3	13.988.620	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	100.00	0.00	6	0	200.00	0.00
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6.067.806.973	100	14.778.687.430	85	6.666.607.000	85	8.187.996.259	100	1.628.595.869	100	2.135.237.535	100	1.572.798.017	100	2.097.716.818	100	7.434.268.239	117.65	91.13	200	14.778.687.430	239.29	243.56	
5.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4.662.230.973	1	12.174.253.656	1	4.662.231.000	1	6.400.555.879	1	1.416.968.069	1	1.805.770.330	1	1.263.597.297	1	1.969.792.351	1	6.054.116.047	100.00	94.59	2	12.174.253.656	200.00	261.69	
5.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	4.652.230.973	45	12.174.253.656	58	4.552.231.000	58	6.400.555.879	44	1.416.968.069	43	1.805.770.330	43	1.263.597.297	43	1.565.792.351	43	6.054.116.047	74.14	94.59	88	12.174.253.656	191.72	261.69	
5.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	142.800.000	0	0	95	180.000.000	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakiaat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	45.400.000	0	0	1	60.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.05.06.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50.000.000	0	0	5	60.000.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	45.400.000	0	0	5	60.000.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	82	528.776.000	75	1.128.117.490	82	431.376.000	82	763.039.000	35	92.608.770	90	192.760.333	75	126.356.342	100	204.497.728	100	618.223.173	121.56	81.02	175	1.128.117.490	213.41	213.36	
5.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	70.000.000	1	60.218.450	12	80.000.000	12	83.164.400	6	16.148.000	6	5.070.000	6	20.825.150	6	14.836.300	24	56.978.450	200.00	68.51	25	60.218.450	208.33	86.03	
5.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8.000.000	40	21.584.000	12	8.000.000	12	18.000.000	3	4.000.000	3	2.785.000	3	1.730.000	3	969.000	12	9.484.000	100.00	52.69	52	21.584.000	433.33	269.80	
5.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	12	26.000.000	12	12.000.000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	26.000.000	100.00	140.00	
5.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	12	91.295.590	12	30.000.000	12	58.675.330	3	9.800.000	3	9.655.750	3	13.821.000	3	19.670.840	12	52.947.590	100.00	88.73	24	91.295.590	200.00	227.82	
5.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	14.400.000	12	8.800.000	12	5.000.000	12	20.000.000	3	0	3	3.500.000	3	3.200.000	0	0	9	6.700.000	75.00	33.50	21	8.800.000	175.00	61.11	
5.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	12	29.492.000	1	5.000.000	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	29.492.000	1.200.00	294.92	
5.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	93	359.176.000	82	888.892.450	93	284.176.000	93	567.999.270	10	62.660.770	16	171.749.583	16	88.680.992	16	169.021.588	60	492.123.333	64.52	86.76	142	888.892.450	152.69	247.48	
5.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Anisip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anisip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7.200.000	0	0	40	7.200.000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	60.000.000	0	245.498.000	75	804.000.000	75	445.800.000	80	0	80	0	80	71.498.000	85	174.000.000	85	245.498.000	113.33	95.07	85	245.498.000	113.33	405.16	
5.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	10.000.000	0	0	5	50.000.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50.000.000	0	245.498.000	5	754.000.000	5	445.800.000	0	0	0	0	3	71.498.000	11	174.000.000	14	245.498.000	280.00	55.07	14	245.498.000	280.00	491.00	
5.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	474.000.000	75	837.820.812	100	474.000.000	100	425.780.000	35	99.018.180	90	111.290.872	75	96.718.878	100	105.970.739	100	412.996.669	100.00	87.00	175	837.820.812	175.00	176.76	
5.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	21.922.000	12	6.000.000	12	14.000.000	3	5.712.000	3	6.288.000	3	0	3	1.992.000	12	13.992.000	100.00	99.94	24	21.922.000	200.00	365.20	

Rencana Kerja Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2025

Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan	
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100			
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
5.01.02.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18,000,000	12	18,887,500	12	18,000,000	12	18,000,000	3	882,000	3	1,004,500	3	1,217,500	3	4,199,000	12	7,303,000	100.00	40.57	24	19,887,500	200.00	110.49		
5.01.02.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450,000,000	16	796,021,102	12	450,000,000	12	393,780,000	3	92,425,180	3	103,998,372	3	95,498,378	3	99,779,739	12	391,701,669	100.00	99.47	28	796,021,102	233.33	176.89		
5.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	82	210,000,000	70	392,997,672	82	225,000,000	82	122,821,380	70	17,968,850	70	25,416,000	75	12,956,900	100	47,456,000	100	103,432,380	121.95	84.21	170	392,997,672	207.32	187.14		
5.01.02.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	4	60,000,000	4	144,584,250	4	60,000,000	4	88,021,380	8	17,968,850	8	6,975,000	8	8,290,500	8	35,430,000	8	68,665,350	200.00	78.01	12	144,584,250	300.00	240.97		
5.01.02.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000	0	34,767,000	5	30,000,000	5	34,900,000	0	0	5	18,441,000	5	4,300,000	5	12,026,000	5	34,767,000	100.00	99.91	5	34,767,000	100.00	115.89		
5.01.02.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	5	213,646,422	1	80,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	5	213,646,422	500.00	712.15			
5.01.02.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40,000,000	0	0	1	5,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	84	1,130,000,000	89.47	1,324,639,043	84	1,020,000,000	84	1,278,711,160	99.64	172,221,057	99.64	207,068,320	85.4	185,027,132	85.4	0	85	534,317,409	101.67	41.79	174.87	1,324,639,043	208.18	117.22		
5.01.02.2.01.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	Persen	69	1,080,000,000	32.64	1,324,639,043	69	900,000,000	69	1,278,711,160	23.09	172,221,057	23.09	207,068,320	65.32	189,027,132	65.32	0	65	534,317,409	94.67	41.79	97.96	1,324,639,043	141.97	122.65		
5.01.02.2.01.03.		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	120,000,000	1	14,295,000	1	120,000,000	1	120,497,600	1	5,500,000	0	0	0	3,640,000	0	0	1	9,140,000	100.00	7.08	2	14,295,000	200.00	11.91		
5.01.02.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	110,000,000	1	108,522,000	1	110,000,000	1	63,860,000	1	25,200,000	0	33,707,000	0	0	0	0	1	58,907,000	100.00	92.24	2	108,522,000	200.00	98.66		
5.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	280,000,000	1	616,636,439	1	480,000,000	1	401,736,480	1	122,296,807	0	173,362,220	0	1,587,500	0	0	1	297,246,527	100.00	73.99	2	616,636,439	200.00	220.30		
5.01.02.2.01.06.		Penyajian Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	170	50,000,000	0	0	170	70,000,000	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.01.07.		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	Dokumen	2	520,000,000	2	584,985,604	2	120,000,000	2	683,617,080	0	19,224,250	0	0	2	149,799,632	0	0	2	169,023,882	100.00	24.72	4	584,985,604	200.00	112.50		
5.01.02.2.04.		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Sistem	1	50,000,000	0	0	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.04.02.		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4	50,000,000	0	0	4	120,000,000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	64	680,000,000	64.29	405,040,196	64	680,000,000	64	439,898,980	77.78	228,000	77.78	30,612,000	65.52	99,967,252	65.52	31,447,166	66	162,254,418	102.38	38.89	65.52	405,040,196	102.38	95.56		
5.01.02.2.02.		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterlaksanaan Data Daerah	Persen	90	400,000,000	97.86	0	90	400,000,000	90	38,568,390	0	0	0	0	97.86	0	97.86	0	98	0	108.73	0.00	97.86	0	108.73	0.00		
5.01.02.2.02.01.		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	300,000,000	3	0	3	300,000,000	3	38,568,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	0	100.00	0.00	Data dalam proses integrasi dalam Satu Data Indonesia		
5.01.02.2.02.03.		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.03.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	90	280,000,000	64.29	405,040,196	60	280,000,000	60	400,290,590	66.67	228,000	66.67	30,612,000	66.67	99,967,252	80	31,447,166	80	162,254,418	133.33	40.53	80	405,040,196	133.33	144.66		
5.01.02.2.03.03.		Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	4	280,000,000	5	405,040,196	4	280,000,000	4	400,290,590	1	228,000	1	30,612,000	1	99,967,252	1	31,447,166	4	162,254,418	100.00	40.53	9	405,040,196	225.00	144.66		
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	800,000,000	90.91	501,671,245	93	800,000,000	93	899,175,450	90.91	12,893,495	90.91	97,014,096	90.91	37,978,600	84.42	242,714,390	84	390,600,581	90.77	38.99	175.33	501,671,245	188.53	62.71		
5.01.03.2.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	800,000,000	90.91	501,671,245	93	800,000,000	93	899,175,450	100	12,893,495	100	97,014,096	100	37,978,600	100	242,714,390	100	390,600,581	107.53	38.99	190.91	501,671,245	205.28	62.71		

Rencana Kerja Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan				
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12		15=14/5x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16		
5.01.03.2.01.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100,000,000	0	0	8	100,000,000	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0	100.00	0.00	8	0	100.00	0.00			
5.01.03.2.01.02.		Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	100,000,000	1	0	8	100,000,000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0	12.50	0.00			
5.01.03.2.01.03.		Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	100,000,000	1	23,242,194	8	100,000,000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	23,242,194	12.50	23.24			
5.01.03.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	100,000,000	32	3117,800	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	32	3117,800	3,200.00	31.12			
5.01.03.2.01.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100,000,000	0	265,258,190	8	100,000,000	8	377,715,960	8	0	0	7,752,400	0	14,791,400	8	242,714,390	8	265,258,190	100.00	70.23	8	265,258,190	100.00	265.26	
5.01.03.2.01.06.		Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	100,000,000	0	0	8	100,000,000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.03.2.01.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	100,000,000	16	23,291,707	8	100,000,000	8	32,457,880	8	0	0	8,538,907	0	2,780,000	0	0	8	11,318,907	100.00	34.87	24	23,291,707	300.00	23.29	
5.01.03.2.01.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	100,000,000	16	158,761,354	1	100,000,000	1	488,001,680	1	12,893,495	0	40,722,709	0	20,407,200	0	0	1	74,023,484	100.00	15.14	17	158,761,354	1,700.00	158.76	
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	1,345,000,000	90.91	391,612,855	93	1,345,000,000	93	644,823,720	93.48	10,594,700	93.48	50,150,857	93.48	45,829,244	93.48	121,469,837	93	228,044,438	100.52	35.37	184.39	391,612,855	188.27	31.45	
5.01.03.2.02.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	93	600,000,000	94.83	151,600,457	93	600,000,000	93	326,071,410	100	0	100	28,455,357	100	10,825,960	100	17,384,000	100	56,675,317	107.53	17.38	184.83	151,600,457	209.49	25.27	
5.01.03.2.02.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75,000,000	8	85,106,068	5	75,000,000	5	164,823,230	0	0	0	210,46,057	5	9,925,960	5	15,475,600	5	46,447,817	100.00	28.18	13	85,106,068	260.00	113.47	
5.01.03.2.02.02.		Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	75,000,000	0	0	5	75,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.03.2.02.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	75,000,000	0	0	5	75,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.03.2.02.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.03.2.02.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75,000,000	12	66,494,389	5	75,000,000	5	191,248,180	0	0	0	7,409,300	5	900,000	5	191,400	5	10,227,700	100.00	6.34	17	66,494,389	340.00	88.66	
5.01.03.2.02.06.		Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	75,000,000	0	0	5	75,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.03.2.02.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	75,000,000	0	0	5	75,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.03.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang SDA	Laporan	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.03.2.03.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	645,000,000	72.97	240,012,398	93	645,000,000	93	318,752,310	100	10,594,700	100	21,895,500	100	35,003,284	100	104,075,637	100	171,389,121	107.53	53.76	172.97	240,012,398	188.99	37.21	
5.01.03.2.03.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	75,000,000	0	0	3	75,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

Rencana Kerja Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2025

Kode	Sasaran	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan				
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12		15=14/6x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	4A																						16			
5.0.03.2.03.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	0	0	3	75,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.0.03.2.03.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	4	15,267,600	3	75,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	15,267,600	133.33	20.36			
5.0.03.2.03.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/SPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	1	224,744,798	3	75,000,000	3	318,762,310	1	10,594,700	1	21,695,500	1	35,003,284	1	104,075,637	4	171,369,121	133.33	53.76	5	224,744,798	166.67	299.66	
5.0.03.2.03.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Disorotasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.0.03.2.03.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.0.03.2.03.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.0.03.2.03.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/SPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	120,000,000	0	0	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.05.		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																											
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DASAR	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	55.00	400,000,000	48.05	231,639,358	55.00	400,000,000	55.00	172,697,920	48.05	13,790,340	48.05	5,062,960	48.05	6,479,380	37.1	83,494,238	37	108,826,918	67.45	63.02	86.16	231,639,358	156.64	57.91	
5.05.02.2.04.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	400,000,000	100	231,639,358	100	400,000,000	100	172,697,920	0	13,790,340	10.64	5,062,960	30.61	6,479,380	87.23	83,494,238	87	108,826,918	87.23	63.02	187.23	231,639,358	187.23	57.91	
5.05.02.2.04.01.		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	150,000,000	1	64,781,340	1	150,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	64,781,340	100.00	43.19			
5.05.02.2.04.03.		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	250,000,000	1	166,858,018	1	250,000,000	1	172,697,920	0	13,790,340	0	5,062,960	0	6,479,380	1	83,494,238	1	108,826,918	100.00	63.02	2	166,858,018	200.00	66.74	
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DASAR	Persentase Implementasi Rencana kelitbang	Persen	25	450,000,000	0	37,281,668	25	525,000,000	25	162,468,360	0	378,317	0	281,268	0	3,928,974	25	30,053,109	25	34,641,668	100.00	21.32	25	37,281,668	100.00	8.28	
5.05.02.2.01.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Perikanan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang Bidang Pemerintahan	Persen	100	50,000,000	0	37,281,668	100	75,000,000	100	162,468,360	0	378,317	0	281,268	0	3,928,974	100	30,053,109	100	34,641,668	100.00	21.32	100	37,281,668	100.00	74.56	
5.05.02.2.01.01.		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	25,000,000	0	34,641,668	1	25,000,000	1	162,468,360	0	378,317	0	281,268	1	3,928,974	1	30,053,109	1	34,641,668	100.00	21.32	1	34,641,668	100.00	138.57	
5.05.02.2.01.12.		Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkatalog dengan Baik	Laporan	1	25,000,000	1	2,640,000	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	2,640,000	100.00	10.56			
5.05.02.2.02.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang Bidang Sosial dan Kependudukan	Persen	100	150,000,000	100	0	100	150,000,000	100	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	100	0	100.00	0.00			
5.05.02.2.02.03.		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.05.02.2.02.05.		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	50,000,000	1	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	0	100.00	0.00			
5.05.02.2.02.08.		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.05.02.2.03.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	250,000,000	0	0	100	300,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.05.02.2.03.01.		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.05.02.2.03.02.		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	100,000,000	1	0	1	100,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	1	0	100.00	0.00			
5.05.02.2.03.04.		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100														
I	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
			dan Pangan																										
5.05.02.2.03.13.		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan *bottom-up* dan *top down*, yang dikenal dengan istilah *shopping list key working plant*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut :

a. Tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Terwujudnya

b. Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diuraikan dalam tabel capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 .

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target		Realisasi		Capaian	
						2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	73,48	78,00	79,50	73,45	78,70	94,17	98,94
		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	6,3	6,5	7,5	7,4	7,6	98,65	101,33
			Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	1,8455	2,8155	2,8255	2,63	2,72	93,41	96,27
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,46	3,47	3,23	3,23	93,35	93,08

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
 - 1) Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan daerah
 - 2) Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan
 - 3) Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang perekonomian dan sosial budaya, di bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup, dan di bidang pemerintahan
 - 4) Masih lemahnya integrasi data antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah
 - 5) Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah
 - 6) Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
 - 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - a. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
 - b. Kesenjangan dan Keadilan Gender masih rendah

- c. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah
 - d. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal
 - e. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur belum memadai
 - f. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal
 - g. Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata belum optimal
 - h. Konektivitas Antar Pulau atau Kecamatan
 - i. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi
 - j. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - k. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
 - l. Menciptakan lapangan kerja baru atau tenaga kerja terampil
- 2) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin meningkat, menjadi tantangan untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendorong perangkat daerah untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
 - 3) Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan nasional yang berubah-ubah menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas pembangunan.
 - 4) Perubahan dinamika di tingkat nasional dan dunia yang terus berubah menuntut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk menyusun dokumen perencanaan Kabupaten Natuna yang komprehensif dan mampu mengantisipasi perkembangan dinamika di tingkat nasional dan global.
- a. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.
 - 2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
 - 3) Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
 - 4) Banyaknya lembaga penelitian atau penyedia jasa yang dapat membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara baik, sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat daerah maupun nasional.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
- b) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2025, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan khususnya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025
dari Pemangku Kepentingan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Sebagai strategi dalam pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Pada tahun 2025 pemerintah mempunyai tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis nasional yang akan ditangani pada tahun 2025 adalah:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Hal Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan Pengangguran Yang Disertai Decent Job
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Dalam Rangka Mendorong Produktivitas
6. Ekonomi Hijau

Rencana Kerja Pemerintah 2025 memiliki tema pembangunan **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Tema pembangunan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas nasional (PN). Tujuh PN tahun 2025 yang merupakan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2025, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 diarahkan pada optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya. Dalam melaksanakan fokus pembangunan dan target pembangunan tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan **prioritas pembangunan** Provinsi Kepulauan Riau untuk RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2025 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dengan tema **“Pemantapan Pembangunan Ekonomi Maritim Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Natuna Yang Unggul dan Sejahtera”**

Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan ekonomi daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan.

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Terwujudnya pelayanan publik yang prima dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2025

MISI 6 : “Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (<i>smart bureaucracy</i>)”.			
Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Target
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Pemda oleh Kemenpanrb yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80
	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Metode pengukuran dan penilaian IKKD dilakukan melalui 2 (dua) tahap, meliputi: a. pengukuran dan penilaian variabel kinerja pemerintah daerah; dan b. pengukuran dan penilaian variabel kepemimpinan kepala daerah.	66
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (100 pengguna layanan)	4,5

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan	Target
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	Nilai evaluasi LKJIP dari Inspektorat	80,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Hasil penilaian aspek kesesuaian antara isu strategis target - Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD atau RKPD, dan aspek riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah	8,0
Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Hasil Penghitungan Skor Nilai Indeks Daya Saing Daerah di Badan Riset Nasional (BRIN)	3,0155
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (100 pengguna layanan)	3,49

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun

2021-2026,

- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Anggaran untuk melaksanakan 4 (empat) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan. Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
						Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			13.696.411.033,00			13.985.372.973,00
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			13.696.411.033,00			13.985.372.973,00
	5	01				PERENCANAAN			12.051.748.753,00			12.035.372.973,00
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	88.45 NILAI 90 PERSEN	7.572.428.503,00		-	7.415.372.973,00
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	80 Persen	119.798.090,00		-	125.000.000,00
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	69.981.090,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	49.817.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55.000.000,00
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran	1 Tepat Waktu	5.035.672.973,00		-	5.135.672.973,00
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.035.672.973,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.135.672.973,00
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95 Persen	156.031.720,00		-	160.000.000,00
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	53.567.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	45.136.360,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	57.328.360,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60.000.000,00
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	84 Persen	712.331.320,00		-	734.000.000,00
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.695.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	24.974.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	49.999.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.696.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24.000.000,00
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19.285.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	498.561.720,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40 Dokumen	25.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	30.120.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80 Persen	487.850.000,00		-	350.700.000,00
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	87.689.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	334.119.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		215.700.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	46.002.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		
	5	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	20.040.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.000.000,00
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100 Persen	509.886.400,00		-	555.000.000,00
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.991.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.000.000,00
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.999.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	469.896.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		510.000.000,00
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	84 Persen	550.858.000,00		-	355.000.000,00
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	79.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		80.000.000,00
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	31.460.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.080.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	99.796.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.772.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40.000.000,00
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIAKOMODIR PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD	66 PERSEN 86 PERSEN	2.180.000.000,00		-	2.320.000.000,00
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	72 Persen	1.330.000.000,00		-	1.430.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	120.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	110.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		130.000.000,00
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	280.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		300.000.000,00
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	820.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		850.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	92 Persen	400.000.000,00		-	420.000.000,00
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	300.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		320.000.000,00
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	70 Persen	350.000.000,00		-	350.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	350.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		350.000.000,00
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Sistem	100.000.000,00		-	120.000.000,00
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4 Dokumen	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		120.000.000,00
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSentase PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	94 PERSEN	2.299.320.250,00		-	2.300.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEREKONOMIAN SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	94 PERSEN				
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	95 Persen	999.547.450,00		-	1.000.000.000,00
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	249.999.820,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250.000.000,00
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	249.994.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	249.958.360,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250.000.000,00
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	249.999.820,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250.000.000,00
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	93 Persen	699.824.800,00		-	700.000.000,00
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	149.994.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 laporan	149.996.270,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93 Persen	599.948.000,00		-	600.000.000,00
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	150.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	149.993.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.950.000.000,00
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN INDEKS INOVASI DAERAH	35 PERSEN 63 NILAI	1.644.662.280,00		-	1.950.000.000,00
	5	05	02	2.01	5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	100 Persen	199.979.720,00		-	200.000.000,00
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	199.979.720,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	299.699.440,00		-	300.000.000,00
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	199.699.440,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	624.983.520,00		-	950.000.000,00
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	99.984.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan						
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	224.999.520,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		350.000.000,00
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 Persen	519.999.600,00		-	500.000.000,00
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	519.999.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000.000,00
J U M L A H									13.696.411.033,00			13.985.372.973,00

3.4 Cascading dan Crosscutting

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauhmana perencanaan Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

3.4.1 Cascading

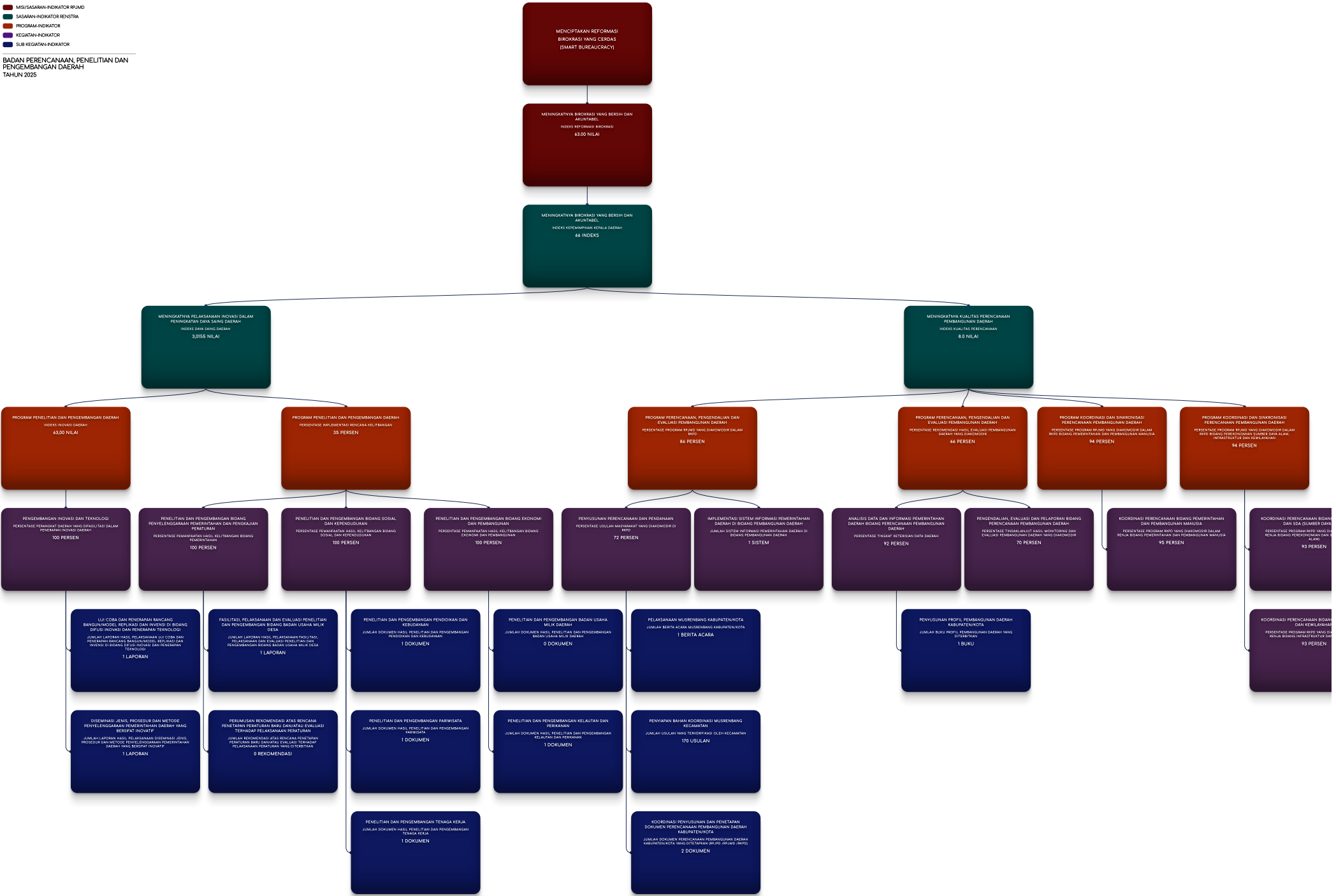
Cascading Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 Cascading Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.

3.4.2 Crosscutting

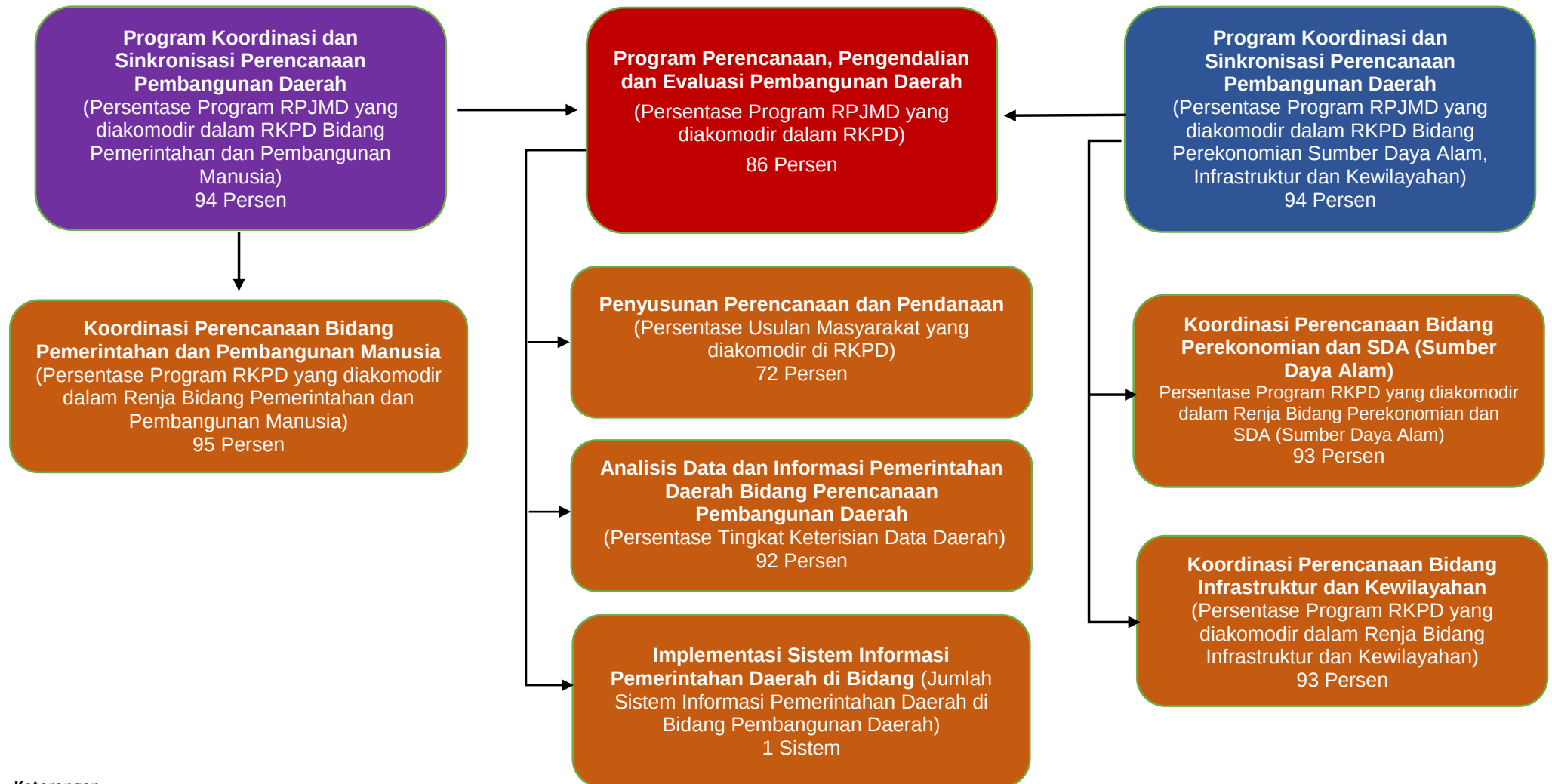
Crosscutting Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada Gambar 3.2 Crosscutting Kinerja Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.

- MISUASAHAN INDIKATOR BRUMD
- SASARAN INDIKATOR RENKSTA
- PROGRAM INDIKATOR
- KEGIATAN INDIKATOR
- SUB KEGIATAN INDIKATOR

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2025



Gambar 3.2
Crosscutting Kinerja Program Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Tahun 2025



Keterangan

- : Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah
- : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- : Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
- : Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 119.798.090,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 69.981.090,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 49.817.000,00

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.035.672.973,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.035.672.973,00

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 156.031.720,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 53.567.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 45.136.360,00
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 57.328.360,00

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 712.331.320,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 39.695.000,00
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 24.974.000,00

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 24.696.000,00
- Penyediaan Bahan/Material
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 19.285.000,00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 498.561.720,00
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 25.000.000,00
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 30.120.000,00

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 487.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Mebel
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 87.689.000,00
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 334.119.000,00
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 46.002.000,00
- Pengadaan Aset Tak Berwujud
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.040.000,00

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.035.672.973,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 19.991.400,00
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 19.999.000,00
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 469.896.000,00

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.035.672.973,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 79.750.000,00

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 31.460.000,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 300.080.000,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 99.796.000,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 39.772.000,00

4.2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.330.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pelaksanaan Konsultasi Publik
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 120.000.000,00
- Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 110.000.000,00
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 280.000.000,00
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 820.000.000,00

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 300.000.000,00
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.000.000,00

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 350.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 350.000.000,00

4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.000.000,00

4.3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 999.547.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 249.999.820,00

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 249.994.000,00

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 249.958.360,00

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 249.595.270,00

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 699.824.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 149.994.000,00

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 149.996.270,00
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 149.896.270,00
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 149.938.360,00
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 99.999.900,00

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 599.948.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 150.000.000,00
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 150.000.000,00
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 149.955.000,00
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 149.993.000,00

4.4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 199.979.720,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 199.979.720,00

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 199.979.720,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 199.699.440,00
- Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 100.000.000,00

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 624.983.520,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 99.984.000,00
- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 100.000.000,00
- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 200.000.000,00
- Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 224.999.520,00

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 519.999.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 519.999.600,00

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 tertuang dalam Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Natuna Tahun 2025.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. NATUNA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						13.696.411.033,00						13.985.372.973,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.696.411.033,00							13.985.372.973,00	
	5.01	PERENCANAAN						12.051.748.753,00							12.035.372.973,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	-			88.45 NILAI 90 PERSEN	7.572.428.503,00						-	7.415.372.973,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			80 Persen	119.798.090,00			-	-	-	-	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	69.981.090,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Sepempang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	49.817.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran	-			1 Tepat Waktu	5.035.672.973,00			-	-	-	-	5.135.672.973,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	5.035.672.973,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.135.672.973,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	156.031.720,00			-	-	-	-	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	53.567.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	45.136.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	57.328.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			84 Persen	712.331.320,00			-	-	-	-	734.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	39.695.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	24.974.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	49.999.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	24.696.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	19.285.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	498.561.720,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	30.120.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			80 Persen	487.850.000,00			-	-	-	-	350.700.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	87.689.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	334.119.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		215.700.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	46.002.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	20.040.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			100 Persen	509.886.400,00			-	-	-	-	555.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	19.991.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.999.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	469.896.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		510.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran</i>	-			84 Persen	550.858.000,00			-	-	-	-	355.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	79.750.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	31.460.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	300.080.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	99.796.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	39.772.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIAKOMODIR PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD	-			66 PERSEN 86 PERSEN	2.180.000.000,00						-	2.320.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD</i>	-			72 Persen	1.330.000.000,00			-	-	-	-	1.430.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	110.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	280.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	820.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	-			92 Persen	400.000.000,00			-	-	-	-	420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindakanj ^{ut} hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	-			70 Persen	350.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	350.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEREKONOMIAN SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	-			94 PERSEN	2.299.320.250,00						-	2.300.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			95 Persen	999.547.450,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	249.999.820,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8 Laporan	249.994.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	249.958.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	249.595.270,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			93 Persen	699.824.800,00			-	-	-	-	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	149.994.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	149.996.270,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	149.896.270,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5 Laporan	149.938.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5 Laporan	99.999.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			93 Persen	599.948.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	149.955.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	149.993.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.644.662.280,00							1.950.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN INDEKS INOVASI DAERAH	-			35 PERSEN 63 NILAI	1.644.662.280,00						-	1.950.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	-			100 Persen	199.979.720,00			-	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	199.979.720,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-			100 Persen	299.699.440,00			-	-	-	-	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	199.699.440,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			100 Persen	624.983.520,00			-	-	-	-	950.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	99.984.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	224.999.520,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	-			100 Persen	519.999.600,00			-	-	-	-	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	519.999.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	J U M L A H							13.696.411.033,00							13.985.372.973,00	

Kab. Natuna, 05 Agustus 2024

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRI, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2025 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan subkegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan program, kegiatan sub kegiatan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Badan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2025 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, 5 Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE

NIP. 19731030 200012 1 003